

DINAMIKA POLITIK LOKAL (STUDI PASANGAN TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR)

Ridho Ahmad Firmansyah

NPP. 32.0556

Asal Pendaftaran Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : ridhoafmy@gmail.com

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo., M.Si

ABSTRACT

Background: The emergence of a single candidate in the election raised the presence of an empty box as the opposing option, indicating anomalies in the democratic process at the local level. **Purpose:** This research aims to analyze the dynamics of local politics in the implementation of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Gresik Regency, which was only participated in by a single candidate pair, also known as a single candidate. **Methods:** This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques apply triangulation, namely interviews, observations, and documentation involving key stakeholders such as the General Election Commission (KPU), Election Supervisory Board (Bawaslu), National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), community figures, and supporters of each choice. The data analysis technique includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study uses the Political Dynamics theory by Komaruddin Hidayat (2013), which consists of four dimensions: historical context, social plurality, government performance, and political tradition. **Result:** The findings show that the emergence of a single candidate is influenced by several factors, including the dominance of local political elites, a high candidacy threshold, and weak political party regeneration. **Conclusion:** This phenomenon not only limits voters' alternatives but also poses a threat to the quality of local democracy and public political participation. The study recommends evaluating the regional head candidacy system and strengthening political education among the public to safeguard the quality of democracy at the local level.

Keywords: 2024 Regional Election, Single Candidate, Empty Box, Local Political Dynamics, Gresik Regency

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Fenomena calon tunggal dalam Pilkada memunculkan kotak kosong sebagai lawananding, yang menjadi indikator adanya anomali dalam proses demokrasi di tingkat daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik lokal yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Gresik yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau dikenal dengan istilah calon tunggal. **Metode:** Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, serta tokoh masyarakat dan pendukung masing-masing pilihan. Teknik analisis data menggunakan Teknik pengumpulan data, reduksi data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Dinamika Politik dari Komaruddin Hidayat (2013), yang terdiri dari empat dimensi, yaitu, sejarah, kemajemukan masyarakat, kinerja pemerintah, dan tradisi politik. **Hasil:** penelitian menunjukkan bahwa munculnya calon tunggal dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya dominasi elite politik lokal, tingginya ambang batas pencalonan (*threshold*), serta lemahnya kaderisasi dalam partai politik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada minimnya alternatif pilihan bagi pemilih, tetapi juga berpotensi mengancam kualitas demokrasi lokal dan partisipasi politik masyarakat. **Kesimpulan:** Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap sistem pencalonan kepala daerah serta penguatan pendidikan politik kepada masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pilkada 2024, Calon Tunggal, Kotak Kosong, Dinamika Politik Lokal, Kabupaten Gresik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat (Robert, 2011). Pengertian Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Seperti pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum tidak hanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin di tingkat pemerintah pusat saja, akan tetapi juga memilih pemimpin di tingkat daerah yakni provinsi, kabupaten dan kota. Pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah salah satunya pemilihan kepala daerah atau yang disingkat Pilkada (Aziz, 2009).. Pilkada merupakan pesta demokrasi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih oleh masyarakat dari daerah tersebut dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap. Dalam *Dinamika Demokrasi, Politik, dan Pemerintahan Daerah*, (Labolo, 2013) menekankan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi lokal bukan semata-mata disebabkan oleh individu pelaku politik, melainkan oleh ketidaksiapan sistem dan kelemahan struktural yang menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif. Ia mendorong adanya pendekatan reflektif dan konstruktif dalam mengkritisi praktik politik, agar transformasi kelembagaan dapat berjalan secara substansial.

Proses pemilihan kepala daerah melalui mekanisme Pilkada selalu disiapkan dengan baik dan didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengikat. Namun kenyataannya, anomali politik seringkali muncul dan tidak bisa dihindarkan, hal ini tentunya menyebabkan pelaksanaan Pilkada menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Beragam kepentingan yang menyelimuti pasangan calon membuat mereka terkesan selalu berusaha dengan segala untuk dapat meraih kedudukan yang diinginkan. Hal tersebut secara tidak langsung merugikan rakyat, yang pada dasarnya rakyat menginginkan kepala daerah yang sudah terpilih mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, bukan hanya sesuai harapan pribadi maupun harapan partainya saja. Seperti pada Pilkada tahun 2024, muncul kotak kosong di beberapa daerah di Indonesia yang jumlahnya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah kotak kosong dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menandakan adanya dinamika khusus yang memengaruhi proses politik di daerah tersebut. Kotak kosong dalam penyelenggaraan Pilkada adalah situasi ketika hanya ada satu pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada serentak, sehingga calon pemilih memiliki hak untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap calon yang terdaftar (Purwaningsih, 2020). Calon tunggal yang telah terdaftar tetap harus memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah supaya bisa menjadi bupati dan wakil bupati terpilih, jika suara sah lebih banyak memilih pada kotak kosong, daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sementara.

1.2. Kesenjangan Masalah

Fenomena kotak kosong memiliki beberapa dampak yang berpengaruh pada refleksi terhadap demokrasi, adanya kotak kosong sering kali dianggap sebagai indikasi kemunduran dalam proses demokrasi (Kurniawan, 2022). Hal ini mencerminkan kurangnya pilihan yang berkualitas bagi pemilih dan bisa menunjukkan bahwa calon yang ada tidak memenuhi harapan masyarakat. Akhirnya kemungkinan pemilihan ulang akan terjadi jika kotak kosong mendapatkan suara lebih banyak daripada calon tunggal. Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat supaya memilih calon yang lebih sesuai dengan harapan mereka.

Fenomena ini juga berdampak pada stabilitas politik di daerah tersebut, karena kemenangan kotak kosong dapat menciptakan ketidakpastian politik, yang mungkin mempengaruhi kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah selama beberapa tahun ke depan. Dengan demikian kotak kosong bukan hanya sekadar pilihan dalam pemilu, tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang lebih luas (Purba dkk, 2022).

Pilkada di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat khususnya warga Kabupaten Gresik, karena KPU telah menetapkan bahwa hanya tersedia satu pasangan calon yang akan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Melihat peristiwa yang terjadi di Kabupaten Gresik dalam pemilihan kepala daerah disebabkan dari dinamika penetapan calon kepala daerah. Penetapan calon kepala daerah berhubungan erat dengan ambang batas atau *threshold* yang telah ditetapkan dalam undang-undang pemilihan. Yang dimana *threshold* menentukan persentase suara yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai untuk dapat mengajukan calon (Sabrina, 2021). Sesuai keputusan KPU Gresik nomor 1134 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu DPRD Gresik, jumlah suara sah Pileg 2024 sebanyak 793.484. Jika putusan MK nomor 60/PUU- XXII/2024, menetapkan batas dalam mengusung pasangan calon sebesar 7,5 persen, maka parpol yang dapat mengusung calon sendiri pada Pilkada 2024 harus mendapatkan suara sebanyak 59.512. Kondisi serupa juga telah dikaji dalam literatur global. (Reilly, 2007) mengemukakan bahwa ketidakhadiran kompetisi elektorat yang sehat dapat mengurangi legitimasi pemerintahan, melemahkan akuntabilitas politik, serta menurunkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Hal ini diperkuat oleh (Diamond dan Morlino, 2004) yang menyatakan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada prosedur elektorat, tetapi juga pada keberadaan kompetisi politik yang bermakna, keterlibatan masyarakat yang luas, dan institusi yang responsif.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks dinamika politik maupun konteks Pilkada dengan pasangan tunggal. Penelitian dengan Danny Widodo Uji Prakoso berjudul “Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017” menemukan peran partai politik dalam rekrutmen dan kaderisasi dalam menangani timbulnya kotak kosong di Kabupaten Pati (Prakoso, 2017). Penelitian Subeki menemukan bahwa koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Lebak memiliki motif pragmatis, yaitu seluruh partai politik secara kompak mengusung calon dari petahana yang akhirnya tidak memberikan dukungan kepada calon independen, sehingga tidak memunculkan partai oposisi (Subeki, 2020). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Joni Firmansyah menunjukkan bahwa partai politik dinilai masih lemah dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu melakukan rekrutmen politik (Firmansyah dkk, 2020). Kemudian KPU dinilai berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilihat dari meningkatnya partisipasi pemilih yang melampaui target nasional. Berdasarkan Penelitian Rofi Aulia Rahman menemukan bahwa menunjukkan bahwa ada beberapa faktor mengapa fenomena tersebut terjadi dan terus mengalami peningkatan, yaitu karena adanya ambang batas untuk mengajukan

calon kepala daerah, ketidakpercayaan publik terhadap partai politik, gagalnya partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan konstituennya, dan partai politik cenderung menghindari risiko kekalahan yang memilih *incumbent* untuk dicalonkan (Rahman dkk, 2022). Sedangkan berdasarkan penelitian dari Badan Pengawas Pemilu menemukan ada 3 faktor penyebab adanya calon tunggal dalam Pilkada. Pertama, faktor Tindakan borong partai, yang biasanya dilakukan oleh calon petahana. Kedua, syarat calon menjadi kepala daerah yang berat, sehingga banyak kandidat memilih mundur untuk maju sebagai calon dalam Pilkada. Ketiga, pelanggaran dalam Pilkada (Bawaslu, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus kepada dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Gresik. Yang dimana pada tahun 2024 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik pertama kali terjadi dengan pasangan tunggal. Isu-isu yang beredar pada saat pendaftaran calon kepala daerah terdapat ada 3 pasangan calon. Kemudian jika melihat hasil pemilihan badan legislatif Kabupaten Gresik seharusnya ada 5 Partai Politik yang bisa mencalonkan kandidatnya masing-masing

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran bagaimana dinamika politik yang terjadi pada Pilkada tahun 2024 dengan calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan tunggal di Kabupaten Gresik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yakni penelitian yang mengutamakan analisis sesuai data yang didapat secara langsung di lapangan kemudian dideskripsikan dan ditarik kesimpulan untuk dapat menyelesaikan masalah. Penulis akan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dikaji dalam penyusunan skripsi yang berkenaan dengan fenomena kotak kosong pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Gresik.

Penulis melakukan pengumpulan data melalui Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Gresik, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Aktivistik Politik, Pendukung Kotak Kosong, Pendukung Calon Tunggal. Adapun pengumpulan data melalui observasi, yang dimulai dengan memahami reaksi masyarakat, mengidentifikasi isu yang muncul, menganalisa potensi konflik yang muncul pasca terselenggaranya Pilkada. Data dalam penelitian kualitatif menurut (Simangunsong, 2017) bersifat deskriptif yang berarti data yang dihimpun dapat berupa jawaban-jawaban langsung yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, data pribadi bersifat elektronik, serta rekaman resmi lainnya. Penulis bermaksud menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data yang diteliti oleh penulis berupa data primer dan data sekunder dimana data primer didapatkan melalui wawancara kepada narasumber, sedangkan data sekunder

didapatkan secara tidak langsung melalui pengumpulan data dan mempelajari beberapa dokumen tertulis yang digunakan sebagai bahan referensi serta perbandingan yang dapat dilakukan dengan mencari data tentang informasi berupa catatan, artikel, buku dan lainnya yang memiliki hubungan dengan Dinamika Politik dalam Pilkada 2024.

Dalam menyusun sebuah hasil penelitian dibuatlah kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik harus mampu menggambarkan kondisi dan pola alur pemikiran penulis untuk memudahkan dalam menjelaskan permasalahan pada penelitian. Kerangka pemikiran dibuat agar argumentasi kita bisa diterima dan harus disusun secara logis dan sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan yang pada akhirnya akan melahirkan kesimpulan (Nuridin, 2019). Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan tiga tahap analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh (Huberman, 1992) yang meliputi pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*verification*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori Komaruddin Hidayat untuk menganalisa dinamika politik lokal yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gresik dengan pasangan tunggal. Menurut (Hidayat, 2019) dinamika politik dapat terjadi karena adanya sejarah, kemajemukan masyarakat, kinerja dari pemerintah dan tradisi politik

3.1. Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Analisis dari Sejarah

Pada dimensi sejarah yang pertama adalah Keterlibatan Masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika politik dalam Pilkada. Sejarah politik dan sosial yang terbentuk di suatu daerah sering kali memengaruhi pola keterlibatan masyarakat dalam proses politik, termasuk partisipasi dalam pemilu dan sikap terhadap calon pemimpin. Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2024 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut. Kehadiran pasangan tunggal dapat memengaruhi antusiasme pemilih, baik dalam bentuk peningkatan dukungan terhadap calon yang ada maupun munculnya sikap apatis akibat terbatasnya pilihan politik.

Berdasarkan temuan di lapangan, politik masyarakat Kabupaten Gresik masih tergolong rendah, dengan hanya 35% yang memahami konsep Pilkada dengan kotak kosong, sementara 65% lainnya masih kurang menyadari pentingnya keterlibatan politik.

Pada dimensi sejarah yang kedua yaitu Perubahan Sikap Sosial pada Masyarakat yang merupakan salah satu indikator penting dalam Pilkada Kabupaten Gresik dengan pasangan tunggal. Kehadiran pasangan tunggal dalam kontestasi politik dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sistem demokrasi, baik dalam bentuk penerimaan terhadap kondisi tersebut maupun munculnya ketidakpuasan akibat terbatasnya pilihan politik. Pada sejarah politik lokal,

perubahan sikap masyarakat terhadap Pilkada dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman dalam pemilu sebelumnya, tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, serta peran media dalam membentuk opini publik.

Pada dimensi sejarah ketiga yaitu keberlanjutan masyarakat, dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) fenomena pasangan tunggal sering kali dikaitkan dengan dominasi politik suatu kelompok atau individu yang telah mengakar kuat dalam pemerintahan daerah. Dalam sejarah politik lokal, keberlanjutan kekuasaan dapat terjadi karena adanya dukungan kuat dari jaringan politik, birokrasi, serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Hal ini dapat memberikan stabilitas dalam pemerintahan, tetapi di sisi lain juga dapat memunculkan kekhawatiran terkait terbatasnya ruang bagi oposisi dan minimnya persaingan politik yang sehat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana keberlanjutan kekuasaan dalam Pilkada Gresik 2024 memengaruhi dinamika politik lokal serta implikasinya terhadap sistem demokrasi di tingkat daerah.

Temuan di lapangan menunjukkan Politik yang bersifat dinamis memungkinkan perubahan pola dalam Pilkada mendatang, terutama dengan meningkatnya partisipasi masyarakat yang semakin kritis, kemajuan teknologi dalam penyebaran informasi politik, dan kesadaran akan pentingnya demokrasi. Di sisi lain, terdapat dua kecenderungan dalam perilaku pemilih di Gresik. Sebagian masyarakat cenderung mempertahankan kepemimpinan dari jaringan yang sudah mapan jika dianggap berhasil, sementara kelompok lainnya, terutama dari kalangan muda dan masyarakat industri, menginginkan perubahan dengan kebijakan yang lebih progresif. Hal ini menunjukkan bahwa Pilkada ke depan berpotensi menjadi lebih kompetitif dengan semakin aktifnya masyarakat dalam menentukan arah politik daerah mereka.

32. Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Analisis dari Kemajemukan Masyarakat

Pada dimensi kemajemukan masyarakat yang pertama yaitu keberagaman masyarakat lokal merupakan faktor yang turut mempengaruhi dinamika politik dalam Pilkada. Keberagaman ini mencakup aspek etnisitas, agama, budaya, dan kondisi sosial ekonomi yang secara historis telah membentuk konfigurasi sosial-politik di tingkat lokal. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, identitas-identitas sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai kategori sosial semata, tetapi juga menjadi landasan dalam pembentukan preferensi politik, mobilisasi pemilih, dan pembentukan aliansi politik lokal (Warganegara & Waley, 2024). Kabupaten Gresik memiliki komposisi masyarakat yang beragam, baik dari segi etnis, agama, budaya, hingga latar belakang ekonomi, yang secara historis membentuk pola interaksi sosial dan politik di daerah tersebut. Keberagaman ini dapat berkontribusi terhadap dinamika Pilkada, di mana kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda mungkin memiliki respons yang bervariasi terhadap keberadaan calon tunggal, baik dalam bentuk dukungan, ketidakpedulian, maupun kritik terhadap sistem demokrasi yang ada.

Selain itu, faktor keberagaman juga dapat berperan dalam menentukan arah politik lokal, termasuk pola koalisi partai, preferensi pemilih, serta bagaimana elite politik membangun strategi untuk mempertahankan atau memperluas basis dukungan mereka. Kabupaten Gresik, yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti pekerja pabrik, buruh tani, nelayan, dan tokoh agama, tidak menjadi faktor utama dalam munculnya pasangan calon tunggal dalam Pilkada. Faktor yang lebih dominan dalam menentukan konfigurasi politik daerah adalah dinamika politik lokal, kekuatan petahana, serta strategi partai politik dalam mengusung calon.

Proses politik dalam pencalonan kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh kesepakatan antara pasangan calon dengan partai politik, di mana partai memiliki kepentingan tersendiri dalam menentukan kandidat yang mereka usung. Meskipun keberagaman masyarakat seharusnya bisa menciptakan variasi pilihan dalam Pilkada, realitanya hal tersebut tidak berbanding lurus dengan ekspektasi akan adanya lebih banyak calon yang bersaing sehingga diperlukan evaluasi terhadap mekanisme politik yang ada agar Pilkada ke depan lebih kompetitif dan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat.

Pada dimensi kedua kemajemukan masyarakat yaitu kohesi masyarakat dalam menghadapi fenomena calon tunggal menjadi salah satu aspek penting dalam dinamika politik lokal, Kohesi masyarakat mencerminkan sejauh mana warga mampu menjaga persatuan dan stabilitas sosial di tengah berbagai perbedaan pandangan terkait keberadaan pasangan tunggal dalam kontestasi politik. Dalam masyarakat yang majemuk, respons terhadap fenomena ini dapat bervariasi, mulai dari penerimaan yang didasarkan pada kepentingan bersama hingga munculnya potensi perpecahan akibat ketidakpuasan terhadap minimnya pilihan politik. Faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, peran elite politik, serta dinamika sosial-ekonomi akan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah masyarakat tetap solid atau justru mengalami polarisasi akibat sistem pemilihan yang terbatas.

Ada permasalahan tentang hasil perhitungan suara yang digugat oleh suatu organisasi masyarakat meskipun ormas tidak memiliki legal *standing* yang sah secara hukum. Namun, fenomena ini mencerminkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, terutama dalam memastikan transparansi dan kejujuran dalam Pilkada. Dengan adanya dinamika ini, penting bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada agar dapat mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

33. Kinerja Pemerintah

Pada dimensi kinerja pemerintah Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsinya, seperti pelayanan publik, penegakan hukum, serta kebijakan ekonomi dan sosial. Kinerja pemerintah yang baik dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Sebaliknya, jika pemerintah dianggap korup, tidak efektif, atau tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, maka dapat muncul gejolak politik seperti protes, ketidakstabilan, atau bahkan pergantian rezim. Kinerja pemerintah merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur dalam Pilkada di Kabupaten Gresik.

Dapat dilihat di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya memengaruhi stabilitas politik. Pemerintahan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan pemerintahan yang buruk dapat memicu ketidakstabilan.

Dimensi pertama pada kinerja pemerintah adalah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah lokal merupakan faktor krusial dalam memahami dinamika politik lokal, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gresik tahun 2024 yang diwarnai dengan keberadaan pasangan tunggal. Tingkat kepercayaan ini mencerminkan sejauh mana masyarakat menilai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Pada situasi di mana hanya terdapat satu pasangan calon, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebelumnya dapat berpengaruh besar terhadap keputusan pemilih, apakah mereka akan memberikan dukungan atau memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidakpuasan.

Adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam di masyarakat Kabupaten Gresik mengenai kinerja pemerintahan daerah dan hasil Pilkada dengan pasangan calon tunggal. Sebagian masyarakat, khususnya pendukung kotak kosong, merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat, pembangunan yang tidak merata, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kekecewaan ini menjadi alasan utama mereka dalam mendukung opsi kotak kosong sebagai bentuk protes politik. Di sisi lain, pendukung pasangan calon tunggal menilai bahwa kepemimpinan saat ini telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam bidang infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Mereka meyakini bahwa kebijakan yang telah diterapkan sudah memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Adanya perbedaan perspektif ini, evaluasi terhadap kinerja pemerintah menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.

34. Tradisi Politik

Tradisi politik di suatu daerah mencerminkan pola interaksi antara masyarakat, elite politik, dan pemerintahan dalam proses demokrasi. Di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tradisi politik yang telah berkembang turut mempengaruhi dinamika pemilihan kepala daerah, termasuk fenomena munculnya pasangan tunggal dalam Pilkada 2024. Pada dimensi tradisi politik yang pertama yaitu kompetisi politik lokal yang merujuk pada tingkat persaingan antara kandidat dalam pemilihan kepala daerah, yang mencerminkan dinamika kekuatan politik di suatu wilayah. Dalam konteks Kabupaten Gresik pada Pilkada 2024, rendahnya jumlah kandidat yang maju, hingga hanya menyisakan satu pasangan calon, menunjukkan adanya dominasi kekuatan politik tertentu. Faktor seperti kuatnya pengaruh petahana, dukungan partai politik yang terpusat pada satu pihak, serta minimnya oposisi yang kuat, turut berkontribusi terhadap menurunnya persaingan politik di tingkat lokal. Selain itu, keterbatasan figur alternatif yang memiliki elektabilitas tinggi dan dukungan yang cukup sering kali membuat kompetisi politik menjadi kurang kompetitif, sehingga melahirkan fenomena calon tunggal dalam Pilkada.

Pencalonan kepala daerah masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek administratif, politik, maupun sosial. Regulasi yang ketat, seperti ambang batas dukungan partai yang tinggi, menjadi kendala bagi calon independen dan partai kecil untuk bersaing dalam Pilkada. Selain itu, faktor finansial, tekanan politik, dan praktik patronase turut mempersempit ruang bagi calon alternatif. Fenomena pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa sistem pencalonan perlu dievaluasi agar kompetisi politik lebih sehat dan demokratis. Beberapa pihak menyoroti perlunya revisi regulasi untuk memberikan peluang lebih besar bagi kandidat independen dan mendorong partai politik mengajukan lebih dari satu calon. Harapan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih adalah kepemimpinan yang transparan, inovatif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memperbaiki mekanisme pencalonan agar Pilkada di masa depan lebih inklusif dan representatif.

35. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap dinamika politik lokal yang kompleks dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Gresik yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau calon tunggal. Fenomena ini menunjukkan kondisi politik lokal yang tidak kompetitif dan menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi di tingkat daerah. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Pilihan yang terbatas membuat masyarakat terjebak dalam situasi dilematik, antara memilih calon tunggal atau menggunakan hak suara untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk protes politik. Pilihan terhadap kotak kosong bukan sekadar bentuk apatisme, tetapi dapat dipahami sebagai simbol ketidakpuasan terhadap kondisi politik yang ada. Di sisi lain, terdapat sebagian masyarakat yang tetap memberikan dukungan kepada calon tunggal karena dianggap memiliki kinerja yang baik, yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan juga turut membentuk dinamika politik.

Penelitian ini juga menyoroti peran lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang telah berupaya menjalankan regulasi dengan melakukan sosialisasi terkait keberadaan kotak kosong dan calon tunggal. Namun, efektivitas sosialisasi tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendorong pemahaman politik masyarakat secara lebih komprehensif. Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini mengonfirmasi teori Dinamika Politik Komaruddin Hidayat yang menekankan empat dimensi utama, yaitu sejarah, kemajemukan masyarakat, kinerja pemerintah, dan tradisi politik. Interaksi antara dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik lokal di Gresik sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, relasi antara elite dan masyarakat, serta konteks historis dan sosial politik yang membentuk pola partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

36. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan informasi terkait adanya gugatan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dari ormas setempat kepada panitia penyelenggara Pilkada terkait kinerja panitia selama proses penyelenggaraan Pilkada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinamika Politik dalam Pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Gresik dengan dianalisis dengan 4 Dimensi Sejarah, Kemajemukan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan, dan Tradisi Politik, dapat dikatakan adaptif, yang artinya mengkaji perubahan yang signifikan akan tetapi masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Karena kebijakan yang sudah ada mampu beradaptasi dengan perubahan fenomena yang terjadi. bahwa dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah dengan pasangan tunggal di Kabupaten Gresik dapat dikatakan tinggi karena munculnya peristiwa yang tidak terduga selama proses pemilihan kepala daerah Menurut hasil analisis dari penelitian terkait partisipasi pemilih yang seharusnya ada 971.740 orang tetapi hanya 650.172 orang yang melaksanakan pemilihan. Hasil yang didapat oleh pasangan tunggal 366.994, hasil perolehan kotak kosong 247.479 dan hasil suara tidak sah 35.749, dari data tersebut timbul spekulasi bahwa kemenangan pasangan tunggal belum mutlak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini mendalami penerapan pada 3 perangkat daerah dan juga lembaga negara yang meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu yang dimana data dan informasi dari lembaga tersebut data nya bersifat rahasia

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi di kabupaten Gresik. Agar Pilkada di masa mendatang dapat berlangsung lebih kompetitif dan demokratis

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, M. N. (2009). "*Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*". 34-36 <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20336885>

Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The Quality of Democracy: An Overview. *Journal of Democracy*, 15(4), 20–31. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0060>

Firmansyah, J. (2020). "*Analisis Penyebab Kemunculan Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020*". 1-8. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/view/2175>

- Hidayat, K. (2013). *"Dinamika Politik Indonesia"*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1-3. <https://www.uinjkt.ac.id/id/dinamika-politik-indonesia/>
- Kurniawan, D. (2022). "Analisi Kegagalan Fungsi Kaderisasi dan Rekrutmen Partai Politik pada Fenomena Calon Tunggal di Pilkada Pasaman Tahun 2020". 6-8. <http://scholar.unand.ac.id/120150/>
- Labolo, M. (2013). *"Dinamika Demokrasi, Politik, dan Pemerintahan Daerah"*. Yogyakarta: Gava Media. https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?id=8198&p=show_detail&utm_source=chatgpt.com
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *"Metodologi Penelitian Sosial"*. Media Sahabat Cendekia. ISBN 978-623-90984-3-8
- Purwaningsih, I., & Titin. (2020). "Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Kemenangan Kotak Kosong pada Pemilihan Walikota Makassar 2018". *Jurnal Wacana Politik*, 20-21. <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/30297>
- Purba, G. T., Subhilar, & Ridho, H. (2022). "Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020". 3-4. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5636>
- Prakoso, D. W. U., & Alfirdaus, L. K. (2018). "Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017". *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2)", 181-190. <https://journal.unas.ac.id/index.php/populis/article/view/1973>
- Robert, H. M. (2011). *"Robert's Rules of Order Newly Revised"* (edisi ke-11th). 438-446. ISBN 978-0-306-82020-5.
- Reilly, B. (2007). *Democracy and Diversity: Political Engineering in the Asia-Pacific*. Oxford University Press.
- Sabrina, F., & Saad, M. (2021). "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold". *Widya Pranata Hukum*, 8-9. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/268>
- Simangunsong, F. (2017). *"Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik-Legalistik-Empirik-Inofativ"*. Bandung: Alfabeta
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 47-72. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1913>
- Warganegara, A., & Waley, P. (2024). *Ethno-religious coalitions and local politics in Indonesia: A case study from Lampung*. *Asian Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2024.2406791>